

Melampaui Kemiskinan Pendapatan

Kapabilitas, Martabat, dan Masa Depan Kesejahteraan Global

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



1 Gagasan Kunci

- 1 Kemiskinan tidak cukup dipahami hanya sebagai kekurangan pendapatan.
- 2 Kesejahteraan sejati berarti kemampuan nyata untuk hidup sehat, belajar, bekerja, dan berpartisipasi.
- 3 Masa depan kebijakan sosial harus berpusat pada manusia, martabat, dan kebebasan substantif.



2 Dari Pendapatan ke Kapabilitas

Pendekatan Lama	Pendekatan Baru
Fokus pada garis kemiskinan	Fokus pada kapabilitas manusia
Mengukur uang/konsumsi	Mengukur pendidikan, kesehatan, standar hidup, partisipasi
Menilai rumah tangga secara rata-rata	Memperhatikan kerentanan dan martabat
Kurang menangkap kualitas hidup	Menilai kebebasan nyata untuk memilih hidup yang bernilai

3 Tiga Pilar Konseptual



A. Kapabilitas (Amartya Sen)

Kemiskinan adalah keterbatasan kebebasan nyata untuk menjadi dan melakukan hal yang bernilai.



B. Martabat (Martha Nussbaum)

Setiap manusia memiliki nilai intrinsik dan berhak hidup dengan hormat, aman, dan bermakna.



C. Kemiskinan Multidimensional (Alkire-Foster)

Kemiskinan diukur dari tumpukan deprivasi: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

4 Apa yang Sebenarnya Hilang?



Pendidikan



Kesehatan



Gizi



Air & Sanitasi



Perumahan Layak



Pekerjaan Layak



Akses Digital



Partisipasi Sosial

Kemiskinan adalah akumulasi deprivasi yang mempersempit peluang hidup seseorang.

5 Kemiskinan Abad ke-21



Perubahan iklim

Dampak cuaca ekstrem, krisis air, dan kerusakan lingkungan.



Krisis pangan

Gangguan produksi, distribusi, dan akses pangan bergizi.



Ketimpangan digital

Kesenjangan akses internet dan teknologi memperlebar jurang kesempatan.



Disrupsi AI & otomasi

Perubahan pekerjaan, kehilangan pekerjaan rutin, dan kebutuhan keterampilan baru.



Konflik dan migrasi

Perang, kekerasan, dan perpindahan penduduk menghancurkan kehidupan.



Kerentanan ekonomi rumah tangga

Pendapatan tidak stabil, utang, dan guncangan mendorong kembali ke kemiskinan.

Kemiskinan masa kini bersifat bertumpuk: material, sosial, ekologis, dan digital.

6 Agenda Masa Depan Kesejahteraan



Ukur kemiskinan secara multidimensional



Perkuat layanan dasar universal



Bangun perlindungan sosial adaptif



Perluas kapabilitas digital dan pekerjaan layak



Jaga lingkungan dan ketahanan iklim

Prinsip Utama

- Inklusif
- Berkeadilan
- Berbasis martabat
- Berorientasi masa depan

7 Pesan Akhir

“Kesejahteraan bukan sekadar lebih banyak pendapatan, tetapi lebih banyak kebebasan, kemampuan, dan martabat untuk menjalani hidup yang bernilai.”



*Rudy C Tarumingkeng: Melampaui Kemiskinan Pendapatan:
Kapabilitas, Martabat, dan Masa Depan Kesejahteraan Global*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

25 Juni 2026

MELAMPAUI KEMISKINAN PENDAPATAN: KAPABILITAS, MARTABAT, DAN MASA DEPAN KESEJAHTERAAN GLOBAL

Abstrak

Kemiskinan selama ini sering dipahami sebagai kekurangan pendapatan. Ukuran seperti garis kemiskinan, pendapatan per kapita, atau konsumsi rumah tangga memang penting karena uang memberi akses terhadap pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan berbagai kebutuhan hidup. Namun, kemiskinan tidak dapat direduksi hanya pada kekurangan uang. Seseorang dapat memiliki pendapatan sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi tetap hidup dalam kondisi tidak bermartabat karena tidak memiliki akses air bersih, sanitasi, pendidikan bermutu, pelayanan kesehatan, keamanan, partisipasi sosial, pekerjaan layak, perlindungan hukum, atau kebebasan menentukan hidupnya sendiri. Artikel ini membahas kemiskinan sebagai persoalan multidimensional dengan menggunakan pendekatan kapabilitas Amartya Sen, pemikiran martabat manusia Martha Nussbaum, pengukuran kemiskinan multidimensional Alkire-Foster, serta wacana pembangunan manusia global. Argumen utama artikel ini adalah bahwa masa depan kesejahteraan global harus bergerak melampaui paradigma pendapatan menuju paradigma kapabilitas dan martabat. Kesejahteraan bukan sekadar "memiliki uang", tetapi "memiliki kemampuan nyata untuk hidup sehat, belajar, bekerja, berpartisipasi, memilih, dan dihormati sebagai manusia." Dalam konteks global, pendekatan ini menjadi semakin penting karena kemiskinan kini berkelindan dengan perubahan iklim, konflik, utang,

ketimpangan teknologi, migrasi, krisis pangan, digital divide, dan disrupsi AI. Dalam konteks Indonesia, pendekatan kapabilitas relevan untuk merancang kebijakan sosial yang tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga memperluas kualitas hidup, mobilitas sosial, ketahanan keluarga, akses digital, dan martabat warga. Artikel ini menyimpulkan bahwa pembangunan masa depan harus menempatkan manusia—bukan angka ekonomi—sebagai pusat penilaian keberhasilan.

Kata kunci: *kemiskinan multidimensional, kapabilitas, martabat manusia, kesejahteraan global, pembangunan manusia, Amartya Sen, Martha Nussbaum, Alkire-Foster, HDI, MPI, keadilan sosial.*

1. Pendahuluan: Mengapa Kemiskinan Tidak Cukup Diukur dengan Pendapatan

Kemiskinan adalah salah satu persoalan paling tua dalam sejarah manusia, tetapi cara kita memahaminya terus berubah. Dalam banyak kebijakan publik, kemiskinan sering didefinisikan secara moneter: seseorang disebut miskin bila pendapatan atau konsumsinya berada di bawah garis tertentu. Pendekatan ini berguna karena relatif mudah diukur, dapat dibandingkan, dan membantu pemerintah menetapkan sasaran bantuan. Namun, pendekatan pendapatan memiliki keterbatasan mendasar. Ia dapat menunjukkan “berapa banyak uang yang dimiliki seseorang”, tetapi tidak selalu menunjukkan “apa yang dapat dilakukan seseorang dengan uang itu” dan “apakah ia hidup secara bermartabat.”

Dua keluarga dengan pendapatan yang sama dapat memiliki kualitas hidup yang sangat berbeda. Keluarga pertama tinggal dekat sekolah, puskesmas, air bersih, transportasi publik, jaringan internet, dan lingkungan aman. Keluarga kedua tinggal di daerah terpencil, rawan banjir, jauh dari fasilitas

kesehatan, tanpa sekolah bermutu, tanpa listrik stabil, dan tanpa perlindungan sosial. Secara moneter mereka mungkin tampak serupa, tetapi secara kapabilitas mereka berbeda. Keluarga pertama memiliki ruang pilihan lebih luas; keluarga kedua terjebak dalam keterbatasan nyata.

Inilah alasan mengapa kemiskinan harus dipahami secara multidimensional. Kemiskinan bukan hanya kekurangan uang, melainkan kekurangan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang dianggap bernilai. Seseorang disebut miskin bukan hanya karena ia tidak mampu membeli barang tertentu, tetapi karena ia tidak mampu hidup sehat, belajar, bekerja layak, mengambil keputusan, bergerak aman, berpartisipasi dalam masyarakat, dan dihormati sebagai manusia.

Data global terbaru juga menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan pendapatan tidak otomatis menyelesaikan kerentanan manusia. Bank Dunia memperkirakan bahwa pada lintasan saat ini, 622 juta orang atau 7,3% populasi dunia masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030, dan 3,4 miliar orang atau hampir 40% populasi dunia kemungkinan hidup dengan kurang dari USD 6,85 per hari. Bank Dunia juga menegaskan bahwa bila pertumbuhan tidak menjadi lebih cepat dan inklusif, penghapusan kemiskinan ekstrem akan membutuhkan puluhan tahun, sementara mengangkat orang di atas garis USD 6,85 per hari dapat memerlukan lebih dari satu abad. ([World Bank](#))

Di sisi lain, UNDP dan OPHI melalui Global Multidimensional Poverty Index 2025 memperkirakan bahwa 1,1 miliar dari 6,3 miliar orang di 109 negara hidup dalam kemiskinan multidimensional akut. Laporan itu juga menunjukkan bahwa kemiskinan multidimensional berkaitan erat dengan risiko iklim: 887 juta orang miskin multidimensional hidup di wilayah yang terpapar setidaknya satu dari empat bahaya iklim, yaitu panas ekstrem, kekeringan, banjir, dan polusi udara. ([Human Development Reports](#))

Fakta ini mengubah cara kita memandang kemiskinan. Orang miskin tidak hanya kekurangan pendapatan; mereka juga sering paling rentan terhadap bencana iklim, konflik, penyakit, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian

pekerjaan. Kemiskinan masa kini adalah kemiskinan yang bertumpuk: pendapatan rendah, pendidikan terbatas, kesehatan rapuh, lingkungan buruk, akses digital lemah, dan daya tawar sosial-politik rendah.

Karena itu, artikel ini mengajukan tesis bahwa masa depan kesejahteraan global harus dibangun di atas tiga fondasi: kapabilitas, martabat, dan keadilan institusional. Kapabilitas menekankan kemampuan nyata manusia untuk menjadi dan melakukan sesuatu yang bernilai. Martabat menekankan bahwa setiap orang memiliki nilai intrinsik yang tidak boleh direduksi menjadi angka produktivitas. Keadilan institusional menekankan bahwa kemiskinan bukan semata kegagalan individu, melainkan sering merupakan hasil dari struktur sosial, ekonomi, politik, dan ekologis yang membatasi pilihan hidup manusia.

2. Keterbatasan Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan memiliki keunggulan praktis. Ia mudah dipahami, mudah dikomunikasikan, dan membantu pemerintah menetapkan bantuan sosial. Garis kemiskinan moneter dapat digunakan untuk menghitung jumlah penduduk miskin, memantau perubahan antarwaktu, dan membandingkan wilayah. Namun, sebagai ukuran kesejahteraan, pendapatan hanyalah salah satu indikator, bukan keseluruhan realitas hidup manusia.

Keterbatasan pertama adalah bahwa pendapatan tidak selalu mencerminkan kebutuhan yang berbeda. Orang dengan disabilitas mungkin membutuhkan biaya tambahan untuk mobilitas, perawatan, atau alat bantu. Orang yang tinggal di daerah mahal membutuhkan pendapatan lebih tinggi untuk mencapai standar hidup yang sama. Anak-anak membutuhkan nutrisi, pendidikan, dan perlindungan yang tidak dapat diwakili hanya oleh pendapatan rumah tangga. Lansia membutuhkan kesehatan, keamanan, dan dukungan sosial. Karena itu, pendapatan yang sama dapat menghasilkan kualitas hidup yang berbeda.

Keterbatasan kedua adalah bahwa pendapatan tidak menjamin akses. Seseorang dapat memiliki uang, tetapi jika tidak ada sekolah, klinik, jalan, listrik, air bersih, atau internet di wilayahnya, maka uang tidak cukup. Pasar tidak menyediakan semua kebutuhan dasar secara merata. Infrastruktur publik, institusi sosial, dan layanan dasar sangat menentukan apakah pendapatan dapat berubah menjadi kesejahteraan.

Keterbatasan ketiga adalah bahwa pendapatan tidak selalu menunjukkan distribusi di dalam rumah tangga. Rumah tangga dapat tampak tidak miskin secara rata-rata, tetapi perempuan, anak, lansia, atau penyandang disabilitas di dalam rumah tangga itu dapat mengalami kekurangan. Pendapatan rumah tangga tidak selalu dibagi adil. Relasi kuasa, norma gender, kekerasan domestik, dan ketergantungan ekonomi dapat membuat sebagian anggota keluarga hidup dalam deprivasi tersembunyi.

Keterbatasan keempat adalah bahwa pendapatan tidak menangkap martabat. Seseorang mungkin menerima bantuan uang, tetapi tetap diperlakukan secara merendahkan. Ia mungkin memiliki pekerjaan, tetapi pekerjaannya berbahaya, tidak aman, tidak dihargai, dan tidak memberi ruang berkembang. Ia mungkin tidak lapar, tetapi tidak memiliki suara dalam keputusan yang memengaruhi hidupnya. Martabat manusia tidak dapat direduksi menjadi pendapatan.

Keterbatasan kelima adalah bahwa pendapatan tidak cukup menangkap kerentanan. Rumah tangga yang hari ini berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat jatuh miskin bila terkena sakit, kehilangan pekerjaan, bencana, gagal panen, utang, atau konflik. Kesejahteraan harus dinilai bukan hanya dari posisi saat ini, tetapi juga dari ketahanan menghadapi guncangan.

Keterbatasan keenam adalah bahwa pendapatan tidak menangkap kualitas lingkungan. Rumah tangga yang tinggal di daerah tercemar, rawan banjir, atau dekat kawasan industri berpolusi mungkin memiliki pendapatan cukup, tetapi hidupnya terancam oleh penyakit dan risiko ekologis.

Kemiskinan ekologis adalah dimensi yang semakin penting dalam abad perubahan iklim.

Karena itu, pendapatan tetap penting tetapi tidak cukup. Ia harus dipadukan dengan ukuran pendidikan, kesehatan, standar hidup, keamanan, akses digital, lingkungan, partisipasi, dan kebebasan sosial. Dengan kata lain, pengukuran kemiskinan harus bergeser dari “berapa uang yang dimiliki?” menuju “kemampuan hidup apa yang benar-benar dimiliki?”

3. Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen

Amartya Sen menawarkan salah satu kerangka paling berpengaruh untuk melampaui kemiskinan pendapatan. Dalam pendekatan kapabilitas, kesejahteraan tidak hanya dinilai dari utilitas, pendapatan, atau kepemilikan barang, tetapi dari *capabilities*: kebebasan nyata seseorang untuk mencapai *functionings* yang bernilai. *Functionings* adalah keadaan dan aktivitas yang dapat dicapai seseorang, seperti sehat, terdidik, memiliki pekerjaan layak, berpartisipasi dalam komunitas, bergerak bebas, hidup tanpa rasa takut, atau memiliki harga diri. *Capabilities* adalah himpunan peluang nyata untuk mencapai *functionings* tersebut.

Perbedaan ini sangat penting. Dua orang dapat memiliki *functionings* yang sama tetapi kapabilitas berbeda. Misalnya, seseorang berpuasa karena pilihan religius dan seseorang kelaparan karena tidak punya makanan sama-sama tidak makan. Namun, yang pertama memiliki pilihan; yang kedua tidak. Pendekatan kapabilitas menekankan kebebasan substantif, bukan hanya hasil lahiriah.

Sen menolak pandangan pembangunan yang hanya menekankan pendapatan nasional. Pembangunan harus dipahami sebagai perluasan kebebasan manusia. Dalam *Development as Freedom*, Sen menyatakan bahwa pembangunan adalah proses memperluas kebebasan nyata yang dinikmati manusia. Kebebasan itu mencakup peluang ekonomi, fasilitas

sosial, jaminan keamanan, kebebasan politik, dan perlindungan transparansi. Gagasan Sen ini menjadi dasar penting bagi Human Development Index dan Human Development Reports. UNDP sendiri menegaskan bahwa pembangunan manusia adalah tentang memperluas kekayaan hidup manusia, bukan sekadar kekayaan ekonomi; fokusnya adalah manusia, peluang, dan pilihan mereka. ([Human Development Reports](#))

Pendekatan kapabilitas memiliki beberapa implikasi.

Pertama, kemiskinan adalah deprivasi kapabilitas. Orang miskin bukan hanya orang yang kekurangan pendapatan, tetapi orang yang kehilangan kemampuan nyata untuk hidup sehat, belajar, bekerja, memilih, dan berpartisipasi. Dengan kata lain, kemiskinan adalah penyempitan horizon kehidupan.

Kedua, kebijakan publik harus memperluas kebebasan substantif. Bantuan pendapatan penting, tetapi harus dikaitkan dengan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, transportasi, internet, keamanan, dan perlindungan sosial. Tujuan kebijakan bukan hanya menaikkan konsumsi, tetapi memperluas kemampuan manusia.

Ketiga, manusia berbeda-beda. Pendapatan yang sama dapat menghasilkan kapabilitas berbeda karena umur, gender, disabilitas, lokasi, kesehatan, norma sosial, dan lingkungan. Kebijakan harus sensitif terhadap keragaman manusia.

Keempat, partisipasi penting. Orang tidak boleh hanya menjadi objek bantuan. Mereka harus menjadi subjek yang ikut menentukan kehidupan mereka. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan barang, tetapi juga soal kurangnya suara.

Kelima, evaluasi pembangunan harus plural. Tidak ada satu angka yang mampu menangkap semua dimensi hidup. Indikator komposit seperti HDI atau MPI berguna, tetapi tetap perlu dilengkapi dengan analisis kualitatif, partisipatif, dan kontekstual.

Pendekatan Sen sangat relevan dalam dunia yang menghadapi disrupsi teknologi. Jika AI, otomasi, dan digitalisasi hanya meningkatkan produktivitas tetapi tidak memperluas kapabilitas manusia, maka pembangunan menjadi timpang. Teknologi harus dinilai dari apakah ia memperluas pilihan hidup manusia, bukan hanya dari apakah ia memperbesar efisiensi pasar.

4. Martabat Manusia dalam Pemikiran Martha Nussbaum

Martha Nussbaum mengembangkan pendekatan kapabilitas dengan tekanan yang lebih eksplisit pada martabat manusia. Jika Sen cenderung membuka ruang deliberasi publik untuk menentukan kapabilitas penting dalam tiap konteks, Nussbaum mengusulkan daftar kapabilitas sentral yang menurutnya perlu dijamin agar manusia dapat hidup bermartabat. Daftar tersebut mencakup kehidupan, kesehatan tubuh, integritas tubuh, imajinasi-pikiran, emosi, akal praktis, afiliasi, hubungan dengan spesies lain, bermain, dan kontrol atas lingkungan politik serta material.

Bagi Nussbaum, martabat berarti bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik, bukan hanya nilai instrumental. Manusia tidak boleh diperlakukan semata sebagai tenaga kerja, konsumen, angka statistik, penerima bantuan, atau objek kebijakan. Ia adalah subjek moral yang memiliki hak untuk berkembang.

Pendekatan martabat penting karena kemiskinan sering melukai bukan hanya tubuh, tetapi juga harga diri. Orang miskin sering mengalami stigma, penghinaan, rasa malu, ketidakberdayaan, dan pengucilan. Mereka mungkin tidak hanya kekurangan makanan, tetapi juga kehilangan rasa bahwa hidup mereka dihargai. Dalam banyak masyarakat, kemiskinan dipandang sebagai kegagalan pribadi. Padahal, banyak kemiskinan lahir dari struktur yang tidak adil: akses tanah timpang, pendidikan buruk, upah rendah, diskriminasi, konflik, bencana, korupsi, atau layanan publik lemah.

Martabat juga menuntut kualitas interaksi negara dengan warga. Program bantuan sosial yang memperlakukan penerima sebagai angka, dicurigai, dipermalukan, atau dipersulit dapat mengurangi martabat meskipun secara material membantu. Pelayanan publik yang merendahkan warga miskin juga menciptakan kemiskinan simbolik. Maka, kebijakan kesejahteraan harus menggabungkan efisiensi administratif dengan etika penghormatan.

Dalam perspektif martabat, pekerjaan juga tidak boleh hanya diukur dari pendapatan. Pekerjaan layak adalah pekerjaan yang memberi keamanan, penghargaan, perlindungan, kesempatan belajar, dan keseimbangan hidup. Pekerjaan yang membuat orang terus hidup dalam ketakutan, bahaya, atau penghinaan tidak cukup disebut sebagai jalan keluar dari kemiskinan.

Martabat juga terkait dengan partisipasi. Orang miskin bukan hanya membutuhkan bantuan; mereka membutuhkan suara. Mereka perlu dilibatkan dalam perencanaan desa, pembangunan kota, kebijakan pangan, layanan kesehatan, pendidikan anak, transformasi digital, dan adaptasi iklim. Tanpa partisipasi, kebijakan untuk orang miskin mudah menjadi kebijakan atas orang miskin.

5. Kemiskinan Multidimensional: Dari Konsep ke Pengukuran

Pendekatan kapabilitas memberi dasar filosofis, tetapi kebijakan publik membutuhkan pengukuran. Di sinilah kontribusi Sabina Alkire dan James Foster menjadi penting. Metode Alkire-Foster mengembangkan pendekatan pengukuran kemiskinan multidimensional dengan dua tahap utama: pertama, menentukan apakah seseorang mengalami deprivasi pada setiap dimensi; kedua, menentukan apakah jumlah atau bobot deprivasi yang dialami cukup untuk mengidentifikasi seseorang sebagai miskin multidimensional.

Metode ini penting karena menggabungkan kejelasan teknis dengan fleksibilitas kebijakan. Negara dapat memilih dimensi yang relevan, seperti pendidikan, kesehatan, standar hidup, pekerjaan, keamanan, atau

lingkungan. Kemiskinan tidak dilihat hanya sebagai kurang pendapatan, tetapi sebagai kombinasi kekurangan yang saling memperkuat.

Global Multidimensional Poverty Index menggunakan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indikatornya mencakup nutrisi, kematian anak, lama sekolah, kehadiran sekolah, bahan bakar memasak, sanitasi, air minum, listrik, perumahan, dan aset. Ini bukan gambaran sempurna dari semua dimensi kemiskinan, tetapi lebih kaya daripada pendapatan semata.

Global MPI 2025 menunjukkan bahwa 1,1 miliar orang hidup dalam kemiskinan multidimensional di 109 negara, dan lebih dari separuhnya adalah anak-anak. Deprivasi yang sering muncul meliputi kurangnya bahan bakar memasak bersih, perumahan, sanitasi, nutrisi, dan listrik. ([Human Development Reports](#)) Fakta bahwa anak-anak sangat besar proporsinya dalam kemiskinan multidimensional menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah saat ini, tetapi juga ancaman bagi masa depan.

Kemiskinan anak memiliki efek jangka panjang. Anak yang mengalami kekurangan gizi, sakit berulang, pendidikan rendah, kekerasan, atau lingkungan tidak aman dapat mengalami hambatan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial. Kemiskinan masa kecil sering menjadi kemiskinan antar-generasi. Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan harus melihat siklus hidup: ibu hamil, bayi, anak usia dini, usia sekolah, remaja, usia kerja, dan lansia.

Keunggulan MPI adalah bahwa ia dapat menunjukkan "komposisi kemiskinan." Dua wilayah dapat memiliki tingkat kemiskinan sama, tetapi sumber deprivasi berbeda. Wilayah pertama mungkin miskin karena sanitasi dan air bersih; wilayah kedua karena pendidikan dan nutrisi; wilayah ketiga karena listrik dan perumahan. Dengan mengetahui komposisi kemiskinan, kebijakan menjadi lebih tepat sasaran.

Namun, pengukuran multidimensional juga memiliki tantangan. Pemilihan dimensi dapat diperdebatkan. Bobot indikator dapat bersifat normatif. Data

tidak selalu tersedia. Indikator kuantitatif tidak selalu menangkap kualitas layanan. Misalnya, anak hadir di sekolah belum tentu belajar dengan baik. Rumah tangga memiliki akses air belum tentu airnya aman. Memiliki pekerjaan belum tentu pekerjaannya bermartabat. Karena itu, MPI harus dipahami sebagai alat bantu, bukan pengganti penilaian sosial yang lebih luas.

6. Pembangunan Manusia: Dari GDP ke HDI dan Lebih Jauh Lagi

Human Development Index lahir sebagai koreksi terhadap dominasi GDP. HDI menggabungkan tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. UNDP menjelaskan bahwa HDI diciptakan untuk menekankan bahwa manusia dan kapabilitasnya harus menjadi kriteria utama dalam menilai pembangunan negara, bukan pertumbuhan ekonomi semata. ([Human Development Reports](#))

HDI sederhana tetapi revolusioner. Ia mengubah percakapan pembangunan: negara tidak cukup kaya; negara harus sehat dan terdidik. Namun, HDI juga terbatas. UNDP sendiri mengakui bahwa HDI hanya menangkap sebagian dari pembangunan manusia dan tidak mencerminkan sepenuhnya ketimpangan, kemiskinan, keamanan manusia, atau pemberdayaan. ([Human Development Reports](#)) Karena itu, UNDP mengembangkan ukuran pelengkap seperti Inequality-adjusted HDI, Gender Inequality Index, Multidimensional Poverty Index, dan Planetary Pressures-adjusted HDI.

Perkembangan ini menunjukkan satu pelajaran penting: kesejahteraan manusia tidak dapat direduksi menjadi satu angka. Bahkan HDI pun harus dilengkapi. Pembangunan manusia abad ke-21 harus memperhatikan setidaknya enam dimensi besar.

Pertama, dimensi kesehatan: usia harapan hidup, kesehatan ibu-anak, gizi, kesehatan mental, akses layanan, dan ketahanan sistem kesehatan.

Kedua, dimensi pendidikan: lama sekolah, kualitas pembelajaran, literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan pembelajaran sepanjang hayat.

Ketiga, dimensi ekonomi: pendapatan, pekerjaan layak, perlindungan sosial, aset, akses keuangan, dan ketahanan terhadap guncangan.

Keempat, dimensi sosial-politik: partisipasi, kebebasan, keamanan, kepercayaan sosial, dan perlindungan hukum.

Kelima, dimensi ekologis: kualitas lingkungan, risiko iklim, air bersih, udara sehat, pangan, dan tempat tinggal aman.

Keenam, dimensi digital: akses internet, literasi teknologi, keamanan data, kemampuan menggunakan AI, dan perlindungan dari diskriminasi algoritmik.

Dalam Human Development Report 2025, UNDP mencatat perlambatan kemajuan pembangunan manusia global serta pelebaran ketimpangan antara negara dengan HDI tinggi dan rendah, tetapi juga menekankan potensi inovasi, termasuk AI, untuk membuka kemungkinan baru bila tata kelolanya inklusif. ([UNDP](#)) Ini memperlihatkan bahwa masa depan kesejahteraan global akan ditentukan bukan hanya oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi oleh kemampuan mengelola teknologi, iklim, ketimpangan, dan institusi secara manusiawi.

7. Kemiskinan, Iklim, dan Kerentanan Baru

Kemiskinan masa depan tidak dapat dipisahkan dari perubahan iklim. Orang miskin sering tinggal di lokasi yang lebih rentan: bantaran sungai, pesisir, daerah rawan longsor, kawasan padat, perumahan tidak layak, atau wilayah pertanian yang bergantung pada hujan. Mereka memiliki tabungan terbatas, asuransi minim, akses kesehatan lemah, dan daya politik rendah. Karena itu, bencana yang bagi kelas menengah mungkin hanya gangguan sementara dapat menjadi bencana hidup bagi keluarga miskin.

Global MPI 2025 untuk pertama kali mengaitkan kemiskinan multidimensional dengan bahaya iklim. Laporan itu menunjukkan bahwa dari 1,1 miliar orang miskin multidimensional, 887 juta terpapar setidaknya satu bahaya iklim, dan 309 juta menghadapi tiga atau empat bahaya sekaligus. ([Human Development Reports](#)) Angka ini penting karena menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kekurangan internal rumah tangga, tetapi juga dengan lingkungan risiko yang makin berbahaya.

Krisis iklim memperbesar kemiskinan melalui beberapa jalur. Pertama, jalur pangan. Kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem dapat menurunkan hasil pertanian, menaikkan harga pangan, dan memperburuk gizi. Kedua, jalur kesehatan. Panas ekstrem, polusi udara, penyakit tropis, dan air tercemar meningkatkan risiko penyakit. Ketiga, jalur pekerjaan. Petani, nelayan, buruh informal, dan pekerja luar ruang sangat rentan terhadap gangguan iklim. Keempat, jalur aset. Banjir dan badai dapat menghancurkan rumah, alat kerja, ternak, perahu, atau lahan. Kelima, jalur migrasi. Kerusakan lingkungan dapat memaksa orang pindah tanpa perlindungan sosial.

Pendekatan kapabilitas membantu kita melihat bahwa krisis iklim bukan hanya masalah emisi, tetapi masalah kebebasan manusia. Ketika banjir menghalangi anak ke sekolah, kapabilitas pendidikan berkurang. Ketika panas ekstrem mengurangi kemampuan bekerja, kapabilitas ekonomi berkurang. Ketika gagal panen menyebabkan utang, kapabilitas masa depan berkurang. Ketika masyarakat pesisir kehilangan ruang hidup, kapabilitas budaya dan sosial ikut terancam.

Karena itu, pengentasan kemiskinan harus terhubung dengan adaptasi iklim. Program sosial harus mempertimbangkan risiko bencana. Infrastruktur dasar harus tahan iklim. Asuransi pertanian, peringatan dini, perlindungan sosial adaptif, restorasi mangrove, pengelolaan air, dan diversifikasi mata pencaharian harus menjadi bagian dari kebijakan kemiskinan. Masa depan kesejahteraan global adalah masa depan yang menggabungkan perlindungan sosial dan perlindungan ekologis.

8. Martabat dalam Era Digital dan AI

Era digital membawa peluang besar bagi pengurangan kemiskinan. Internet dapat membuka akses pendidikan, pasar, layanan kesehatan, informasi cuaca, keuangan digital, identitas administratif, dan peluang kerja. AI dapat membantu diagnosis kesehatan, pembelajaran adaptif, pertanian presisi, layanan publik, dan prediksi bencana. Namun, teknologi juga dapat memperdalam kemiskinan bila aksesnya timpang dan tata kelolanya tidak adil.

Kemiskinan digital memiliki beberapa bentuk. Pertama, tidak memiliki akses perangkat dan internet. Kedua, memiliki akses tetapi kualitasnya buruk atau mahal. Ketiga, memiliki akses tetapi tidak memiliki literasi digital. Keempat, menjadi pengguna tetapi tidak memiliki kontrol atas data. Kelima, terkena bias algoritma dalam kredit, pekerjaan, pendidikan, atau layanan publik. Keenam, kehilangan pekerjaan karena otomasi tanpa perlindungan.

Dalam pendekatan kapabilitas, teknologi bukan tujuan akhir. Teknologi bernilai jika memperluas kemampuan manusia. Aplikasi pendidikan tidak berguna bila anak tidak punya gawai, listrik, guru pendamping, atau lingkungan belajar. Kredit digital tidak memberdayakan bila menjerat orang miskin dalam bunga tinggi. Platform kerja tidak meningkatkan martabat bila pekerja tidak memiliki jaminan sosial, transparansi algoritma, atau mekanisme keberatan.

UNDP Indonesia dalam peluncuran HDR 2025 menekankan bahwa pertanyaan utama bukan teknologi itu sendiri, tetapi bagaimana teknologi—termasuk AI—dikelola agar mendorong pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, dialog UNDP-Bappenas-DEN juga menyoroti pentingnya etika, tata kelola AI, dan masa depan kerja. ([UNDP](#))

Martabat digital berarti bahwa warga miskin tidak boleh menjadi objek eksperimen teknologi tanpa perlindungan. Data mereka harus aman.

Keputusan algoritmik harus dapat dijelaskan. Layanan digital harus inklusif bagi lansia, penyandang disabilitas, masyarakat pedesaan, dan kelompok berpendidikan rendah. Teknologi publik harus memperkuat hak warga, bukan memperbesar pengawasan atau diskriminasi.

Dengan demikian, masa depan kesejahteraan global membutuhkan "kapabilitas digital." Ini mencakup akses, literasi, keamanan, kemampuan produksi digital, perlindungan data, dan peluang menggunakan teknologi untuk memperbaiki hidup. Tanpa kapabilitas digital, kemiskinan abad ke-21 akan mengambil bentuk baru: bukan hanya tidak punya uang, tetapi tidak mampu berpartisipasi dalam dunia yang semakin digital.

9. Kemiskinan sebagai Persoalan Relasi dan Institusi

Kemiskinan sering dipresentasikan sebagai kondisi individu: orang miskin tidak memiliki pendapatan, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki keterampilan. Namun, kemiskinan juga merupakan persoalan relasi. Orang menjadi miskin karena relasi sosial, ekonomi, politik, dan ekologis tertentu membatasi peluangnya.

Relasi kerja dapat menciptakan kemiskinan bila upah rendah, pekerjaan tidak aman, jam kerja panjang, dan tidak ada perlindungan sosial. Relasi pasar dapat menciptakan kemiskinan bila petani atau nelayan memiliki daya tawar lemah terhadap tengkulak, distributor, atau platform. Relasi gender dapat menciptakan kemiskinan bila perempuan tidak memiliki akses pendidikan, aset, warisan, kredit, keamanan, atau keputusan reproduksi. Relasi wilayah dapat menciptakan kemiskinan bila daerah terpencil tidak memperoleh infrastruktur, guru, dokter, atau internet. Relasi politik dapat menciptakan kemiskinan bila warga tidak memiliki suara dan kebijakan dikuasai elite.

Institusi juga sangat penting. Negara yang memiliki sistem pendidikan buruk akan menciptakan kemiskinan kapabilitas. Sistem kesehatan yang mahal menciptakan kemiskinan karena sakit. Sistem hukum yang lemah

membuat orang miskin rentan terhadap penggusuran, eksploitasi, dan kekerasan. Sistem pajak yang tidak adil membatasi kemampuan negara membiayai layanan publik. Sistem keuangan yang eksklusif menghambat usaha kecil. Sistem tata ruang yang buruk menempatkan warga miskin di lokasi rawan bencana.

Pendekatan kapabilitas tidak menyalahkan individu secara sempit. Ia bertanya: struktur apa yang menghambat kebebasan nyata seseorang? Dengan pertanyaan ini, kebijakan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan, tetapi masuk ke reformasi institusi: pendidikan, kesehatan, tanah, pekerjaan, pasar, hukum, pajak, transportasi, data, dan lingkungan.

10. Pendidikan sebagai Inti Kapabilitas

Pendidikan adalah salah satu kapabilitas paling strategis karena membuka kapabilitas lain. Orang yang terdidik lebih mampu memahami informasi kesehatan, memperoleh pekerjaan lebih baik, berpartisipasi dalam demokrasi, menggunakan teknologi, mengelola keuangan, dan memperjuangkan hak. Namun, pendidikan tidak boleh hanya diukur dari lama sekolah. Yang lebih penting adalah pembelajaran bermakna.

Kemiskinan pendidikan memiliki banyak wajah. Anak dapat hadir di sekolah tetapi tidak belajar. Guru dapat hadir tetapi tidak memiliki pelatihan memadai. Sekolah dapat berdiri tetapi tidak memiliki buku, laboratorium, internet, sanitasi, atau lingkungan aman. Anak perempuan dapat bersekolah tetapi menghadapi norma yang membatasi cita-cita. Anak miskin dapat lulus tetapi tidak memiliki jaringan, bimbingan karier, atau modal sosial.

Pendekatan kapabilitas menuntut pendidikan yang memperluas kebebasan. Pendidikan bukan hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, berimajinasi, berdialog, memahami dunia, berempati, dan mengambil keputusan etis. Dalam dunia AI, pendidikan harus memperkuat kemampuan yang tidak mudah digantikan

mesin: penalaran, kreativitas, komunikasi, nilai, kepemimpinan, dan kebijaksanaan.

Kebijakan pendidikan untuk mengurangi kemiskinan harus dimulai sejak usia dini. Nutrisi, stimulasi, kesehatan ibu-anak, dan lingkungan keluarga sangat menentukan perkembangan. Kemudian diperlukan sekolah dasar bermutu, guru baik, akses digital, pembelajaran kontekstual, pendidikan vokasi, perguruan tinggi inklusif, serta pembelajaran sepanjang hayat. Jika pendidikan hanya diberikan secara formal tetapi kualitasnya timpang, ia dapat memperkuat ketimpangan.

11. Kesehatan, Gizi, dan Tubuh yang Bermartabat

Tubuh adalah basis kapabilitas. Orang yang sakit kronis, kurang gizi, atau hidup dalam lingkungan tidak sehat memiliki kebebasan yang terbatas. Ia mungkin tidak mampu belajar, bekerja, bergerak, atau berpartisipasi. Karena itu, kesehatan bukan hanya layanan medis, tetapi fondasi martabat.

Kemiskinan kesehatan terjadi ketika orang tidak memiliki akses layanan, obat, nutrisi, sanitasi, air bersih, kesehatan mental, atau lingkungan aman. Biaya kesehatan juga dapat mendorong rumah tangga jatuh miskin. Banyak keluarga miskin menjual aset, berutang, atau menghentikan pendidikan anak karena sakit.

Gizi sangat penting, terutama pada awal kehidupan. Kekurangan gizi pada ibu hamil dan anak dapat berdampak panjang pada perkembangan otak, imunitas, kemampuan belajar, dan produktivitas masa depan. Maka, pengentasan kemiskinan harus menggabungkan pendapatan, pangan bergizi, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan primer, edukasi keluarga, dan perlindungan sosial.

Kesehatan mental juga harus masuk dalam agenda kapabilitas. Kemiskinan sering disertai stres, kecemasan, depresi, rasa malu, dan ketidakpastian. Orang miskin hidup dengan beban pengambilan keputusan yang berat:

membeli makanan atau obat, membayar sekolah atau utang, bekerja sakit atau kehilangan pendapatan. Kesejahteraan global masa depan harus mengakui kesehatan mental sebagai dimensi penting martabat.

12. Pekerjaan Layak dan Kapabilitas Ekonomi

Keluar dari kemiskinan tidak cukup dengan memiliki pekerjaan; yang diperlukan adalah pekerjaan layak. Pekerjaan layak memberi pendapatan memadai, keamanan, perlindungan, hak berserikat, keselamatan, kesempatan belajar, dan penghormatan. Pekerjaan yang berbahaya, informal, berupah rendah, tanpa jaminan sosial, dan tanpa prospek dapat membuat orang tetap miskin meskipun bekerja keras.

Kemiskinan pekerja adalah masalah besar di banyak negara berkembang. Banyak orang miskin tidak menganggur; mereka bekerja, bahkan bekerja panjang, tetapi produktivitas dan upahnya rendah. Mereka berada di sektor informal, pertanian kecil, usaha mikro, kerja rumah tangga, transportasi informal, perdagangan kecil, atau platform gig.

Pendekatan kapabilitas mengubah fokus kebijakan dari sekadar “menciptakan pekerjaan” menjadi “menciptakan pekerjaan yang memperluas kehidupan.” Ini mencakup upah layak, pelatihan, akses kredit, perlindungan sosial portabel, keselamatan kerja, kepastian kontrak, dan peluang naik kelas.

Di era AI dan otomasi, kapabilitas ekonomi harus mencakup reskilling dan upskilling. Pekerja tidak boleh ditinggalkan oleh teknologi. Negara, perusahaan, dan lembaga pendidikan harus membangun sistem pembelajaran sepanjang hayat. Bila teknologi meningkatkan produktivitas tetapi tidak meningkatkan kapabilitas pekerja, maka inovasi dapat memperdalam ketimpangan.

13. Gender, Disabilitas, dan Kemiskinan yang Tidak Terlihat

Kemiskinan tidak dialami secara sama oleh semua kelompok. Perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, minoritas, dan migran sering menghadapi hambatan tambahan. Kemiskinan mereka dapat tersembunyi di balik angka rata-rata rumah tangga atau pendapatan wilayah.

Gender sangat penting. Perempuan sering memikul kerja perawatan tidak berbayar: mengurus anak, lansia, rumah, makanan, air, dan kesehatan keluarga. Kerja ini menopang ekonomi, tetapi sering tidak dihitung. Perempuan juga dapat menghadapi diskriminasi upah, keterbatasan akses aset, kekerasan, perkawinan anak, dan norma yang membatasi mobilitas. Maka, pengentasan kemiskinan harus mencakup layanan perawatan, pendidikan anak perempuan, kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan, akses aset, dan partisipasi ekonomi.

Disabilitas juga harus dilihat sebagai persoalan kapabilitas. Banyak penyandang disabilitas bukan miskin karena kondisi tubuhnya semata, tetapi karena lingkungan sosial tidak inklusif: sekolah tidak ramah disabilitas, transportasi tidak aksesibel, stigma tinggi, pekerjaan diskriminatif, dan layanan kesehatan terbatas. Pendekatan kapabilitas mengajarkan bahwa kebijakan harus mengubah lingkungan agar kemampuan manusia dapat berkembang.

Kemiskinan lansia juga semakin penting dalam masyarakat yang menua. Lansia membutuhkan kesehatan, pendapatan, perawatan, relasi sosial, dan keamanan. Tanpa sistem pensiun dan perawatan jangka panjang, banyak lansia bergantung pada keluarga yang juga rentan.

14. Perlindungan Sosial Adaptif

Perlindungan sosial adalah instrumen penting untuk memperluas kapabilitas. Bantuan tunai, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, subsidi tepat sasaran, pensiun, bantuan pangan, beasiswa, dan layanan

sosial dapat mencegah rumah tangga jatuh miskin serta membantu mereka bangkit.

Namun, perlindungan sosial masa depan harus adaptif. Dunia semakin penuh guncangan: pandemi, perubahan iklim, konflik, inflasi pangan, disrupsi teknologi, dan krisis keuangan. Perlindungan sosial tidak boleh hanya menjadi program rutin; ia harus mampu merespons krisis secara cepat.

Perlindungan sosial adaptif memiliki beberapa unsur. Pertama, data sosial yang akurat tetapi menghormati privasi. Kedua, mekanisme pembayaran cepat. Ketiga, keterkaitan dengan sistem peringatan dini bencana. Keempat, fleksibilitas memperluas cakupan saat krisis. Kelima, integrasi dengan pelatihan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Keenam, mekanisme pengaduan agar warga tidak kehilangan hak karena kesalahan administratif.

Dalam pendekatan kapabilitas, perlindungan sosial bukan sekadar konsumsi jangka pendek. Ia adalah investasi kebebasan. Bantuan pendapatan dapat membuat anak tetap sekolah, keluarga tetap makan, pasien tetap berobat, petani tidak menjual aset produktif, dan pekerja berani mencari pekerjaan lebih baik. Dengan kata lain, perlindungan sosial melindungi masa depan.

15. Kesejahteraan Global dan Keadilan Institusional

Kemiskinan global tidak hanya disebabkan oleh kebijakan domestik negara miskin. Ia juga dipengaruhi oleh tatanan global: perdagangan, utang, pajak internasional, hak kekayaan intelektual, perubahan iklim, konflik geopolitik, migrasi, dan arus modal. Karena itu, masa depan kesejahteraan global memerlukan keadilan institusional lintas negara.

Negara berkembang sering menghadapi ruang fiskal terbatas. Mereka harus membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transisi energi,

perlindungan sosial, dan adaptasi iklim, tetapi pada saat yang sama menghadapi utang, volatilitas komoditas, dan kompetisi pajak. Jika perusahaan multinasional dapat menghindari pajak, negara kehilangan sumber daya untuk memperluas kapabilitas rakyat. Jika paten obat dan teknologi terlalu mahal, akses kesehatan dan energi bersih terganggu. Jika pembiayaan iklim tidak memadai, negara rentan menanggung beban yang tidak mereka sebabkan secara historis.

Keadilan global menuntut bahwa pengurangan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui bantuan, tetapi melalui perubahan aturan. Diperlukan sistem pajak global yang adil, restrukturisasi utang yang manusiawi, pembiayaan iklim, transfer teknologi, perdagangan yang memberi ruang kebijakan pembangunan, dan perlindungan migran. Kemiskinan global adalah persoalan moral, tetapi juga persoalan desain institusi.

16. Implikasi bagi Indonesia

Indonesia telah mengalami kemajuan penting dalam pembangunan manusia, tetapi tantangan multidimensional tetap besar. UNDP Indonesia mencatat bahwa dalam Human Development Report 2025, Indonesia berada pada peringkat 113 dari 193 negara, naik dari peringkat 114 pada laporan 2023/24, dengan skor HDI 0,728 dan masuk kategori “high human development.” ([UNDP](#)) Angka ini menunjukkan kemajuan, tetapi pendekatan kapabilitas mengingatkan bahwa rata-rata nasional belum cukup. Kita perlu melihat ketimpangan antarwilayah, kualitas pendidikan, kesehatan, gizi, lingkungan, pekerjaan informal, akses digital, dan kerentanan iklim.

Bagi Indonesia, pendekatan “melampaui kemiskinan pendapatan” memiliki beberapa implikasi.

Pertama, kebijakan kemiskinan harus berbasis siklus hidup. Intervensi harus dimulai dari ibu hamil, bayi, anak usia dini, usia sekolah, remaja, pekerja

muda, keluarga produktif, dan lansia. Kemiskinan tidak dapat diputus hanya dengan bantuan tunai sesaat.

Kedua, stunting, pendidikan, dan sanitasi harus dilihat sebagai kemiskinan kapabilitas. Anak yang kurang gizi dan tidak belajar dengan baik mungkin tidak miskin secara pendapatan hari ini, tetapi kapabilitas masa depannya sudah terhambat.

Ketiga, perlindungan sosial harus terhubung dengan pekerjaan layak. Bantuan sosial penting, tetapi harus dipadukan dengan pelatihan, akses pasar, kredit produktif, koperasi, UMKM, dan perlindungan pekerja informal.

Keempat, transformasi digital harus inklusif. Internet, AI, data, dan platform harus digunakan untuk memperluas kapabilitas warga, bukan memperbesar ketimpangan. Sekolah, desa, UMKM, petani, nelayan, dan pekerja informal harus masuk dalam agenda digital nasional.

Kelima, kemiskinan wilayah harus ditangani melalui infrastruktur dasar. Jalan, air bersih, listrik, internet, sekolah, puskesmas, transportasi, dan layanan administrasi adalah prasyarat kapabilitas.

Keenam, kebijakan iklim harus menjadi kebijakan kemiskinan. Banjir, kekeringan, panas ekstrem, dan kerusakan pesisir dapat mendorong kemiskinan baru. Adaptasi iklim harus diprioritaskan bagi kelompok rentan.

Ketujuh, martabat harus menjadi prinsip pelayanan publik. Warga miskin harus dilayani dengan hormat, mudah, transparan, dan tidak distigmatisasi. Administrasi sosial harus menjadi sarana penghormatan, bukan sumber penghinaan.

17. Kerangka Kebijakan: Dari Pengurangan Kemiskinan ke Perluasan Kapabilitas

Untuk bergerak melampaui kemiskinan pendapatan, diperlukan kerangka kebijakan yang lebih komprehensif. Berikut sepuluh prinsip yang dapat menjadi dasar.

Pertama, ukur kemiskinan secara multidimensional. Pendapatan tetap diukur, tetapi harus dilengkapi dengan pendidikan, kesehatan, gizi, sanitasi, perumahan, listrik, internet, pekerjaan, lingkungan, keamanan, dan partisipasi.

Kedua, gunakan data untuk memahami komposisi kemiskinan. Kebijakan harus menjawab deprivasi spesifik setiap wilayah dan kelompok.

Ketiga, jadikan anak sebagai pusat strategi. Investasi pada gizi, kesehatan, pendidikan anak usia dini, dan perlindungan anak adalah investasi kapabilitas jangka panjang.

Keempat, bangun layanan dasar universal bermutu. Pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, energi, dan konektivitas digital harus diperlakukan sebagai fondasi sosial.

Kelima, perkuat pekerjaan layak. Pekerjaan harus memberi pendapatan, keamanan, perlindungan, dan ruang berkembang.

Keenam, bangun perlindungan sosial adaptif. Sistem sosial harus mampu merespons krisis ekonomi, kesehatan, iklim, dan teknologi.

Ketujuh, lindungi martabat warga. Kebijakan sosial harus menghormati, melibatkan, dan mendengarkan warga miskin.

Kedelapan, masukkan lingkungan dalam pengentasan kemiskinan. Adaptasi iklim, kualitas lingkungan, dan perlindungan ekosistem harus menjadi bagian dari kebijakan kesejahteraan.

Kesembilan, perluas kapabilitas digital. Akses internet, literasi digital, keamanan data, dan kemampuan menggunakan AI harus menjadi agenda sosial.

Kesepuluh, ubah ukuran keberhasilan pembangunan. Keberhasilan bukan hanya menurunkan angka kemiskinan moneter, tetapi meningkatkan kehidupan bermartabat.

18. Penutup: Kesejahteraan sebagai Kebebasan Bermartabat

Kemiskinan pendapatan adalah masalah serius, tetapi ia bukan seluruh cerita. Manusia tidak hidup dari uang saja. Manusia hidup dari kesehatan, pengetahuan, relasi, keamanan, lingkungan, pekerjaan, kebebasan, dan penghormatan. Pendapatan adalah sarana penting, tetapi tujuan pembangunan adalah kehidupan manusia yang bermartabat.

Pendekatan kapabilitas mengajarkan bahwa pembangunan harus dinilai dari kebebasan nyata manusia untuk hidup sesuai nilai yang mereka anggap penting. Pendekatan martabat mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak boleh direduksi menjadi produktivitas ekonomi. Pengukuran multidimensional membantu kebijakan melihat deprivasi yang tersembunyi di balik rata-rata pendapatan.

Masa depan kesejahteraan global akan ditentukan oleh kemampuan dunia mengatasi kemiskinan bertumpuk: pendapatan rendah, pendidikan lemah, kesehatan rapuh, lingkungan berbahaya, akses digital timpang, pekerjaan rentan, dan suara politik terbatas. Tantangan ini tidak dapat dijawab oleh pertumbuhan ekonomi saja. Ia membutuhkan negara berkapasitas, pasar yang adil, teknologi yang inklusif, perlindungan sosial adaptif, dan tata kelola global yang lebih berkeadilan.

Bagi Indonesia, agenda ini sangat relevan. Pembangunan tidak boleh berhenti pada penurunan angka kemiskinan. Pembangunan harus memperluas kapabilitas warga dari Sabang sampai Merauke: anak yang sehat dan belajar, petani yang memiliki akses teknologi, nelayan yang aman menghadapi iklim, perempuan yang memiliki kesempatan, pekerja informal yang terlindungi, lansia yang dihormati, penyandang disabilitas yang dapat berpartisipasi, dan generasi muda yang siap menghadapi AI.

Kesejahteraan global masa depan harus didefinisikan ulang: bukan sekadar lebih banyak pendapatan, tetapi lebih banyak kebebasan; bukan sekadar konsumsi, tetapi martabat; bukan sekadar pertumbuhan, tetapi kehidupan yang dapat dijalani dengan harapan.

Glossarium

Adaptasi iklim

Upaya menyesuaikan sistem sosial, ekonomi, dan ekologis agar masyarakat lebih mampu menghadapi dampak perubahan iklim.

Alkire-Foster Method

Metode pengukuran kemiskinan multidimensional yang mengidentifikasi deprivasi pada beberapa dimensi dan menghitung siapa yang miskin berdasarkan jumlah atau bobot deprivasi.

Capability approach / pendekatan kapabilitas

Kerangka Amartya Sen dan Martha Nussbaum yang menilai kesejahteraan berdasarkan kemampuan nyata manusia untuk menjadi dan melakukan hal yang bernilai.

Deprivasi

Kekurangan atau kehilangan akses terhadap sesuatu yang penting bagi kehidupan bermartabat, seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, atau keamanan.

Digital divide

Kesenjangan akses, kualitas, literasi, dan manfaat teknologi digital antarindividu, kelompok, atau wilayah.

Functionings

Keadaan atau aktivitas bernilai yang dicapai seseorang, seperti sehat, terdidik, bekerja layak, atau berpartisipasi sosial.

Garis kemiskinan

Ambang pendapatan atau konsumsi minimum yang digunakan untuk mengidentifikasi penduduk miskin secara moneter.

HDI / Human Development Index

Indeks pembangunan manusia yang menggabungkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

IHDI / Inequality-adjusted HDI

HDI yang disesuaikan dengan ketimpangan dalam distribusi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Kapabilitas digital

Kemampuan nyata untuk mengakses, memahami, menggunakan, dan mengontrol teknologi digital secara aman dan produktif.

Kemiskinan absolut

Kemiskinan yang diukur berdasarkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum.

Kemiskinan multidimensional

Kemiskinan yang dilihat sebagai gabungan berbagai deprivasi, bukan hanya kekurangan pendapatan.

Kemiskinan relatif

Kemiskinan yang diukur berdasarkan posisi seseorang atau kelompok relatif terhadap standar hidup masyarakat sekitarnya.

Kerentanan

Risiko seseorang atau rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan akibat guncangan seperti sakit, bencana, kehilangan pekerjaan, atau konflik.

Martabat manusia

Nilai intrinsik setiap orang sebagai manusia yang harus dihormati dalam kebijakan, ekonomi, dan kehidupan sosial.

MPI / Multidimensional Poverty Index

Indeks kemiskinan multidimensional yang mengukur deprivasi pada beberapa dimensi seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Pembangunan manusia

Pendekatan pembangunan yang menempatkan manusia, kapabilitas, peluang, dan pilihan sebagai pusat kemajuan.

Perlindungan sosial adaptif

Sistem perlindungan sosial yang mampu merespons guncangan ekonomi, iklim, kesehatan, atau teknologi secara cepat dan fleksibel.

Poverty trap

Keadaan ketika rumah tangga sulit keluar dari kemiskinan karena kekurangan aset, pendidikan, kesehatan, akses pasar, atau perlindungan.

Resiliensi

Kemampuan individu, rumah tangga, atau masyarakat untuk bertahan, pulih, dan beradaptasi setelah mengalami guncangan.

Stigma kemiskinan

Pandangan merendahkan terhadap orang miskin yang menganggap kemiskinan semata-mata sebagai kegagalan pribadi.

Well-being / kesejahteraan

Kualitas hidup yang mencakup kesehatan, pendidikan, keamanan, relasi sosial, pekerjaan, martabat, kebebasan, dan lingkungan.

Daftar Pustaka

Format APA 7. DOI dicantumkan jika tersedia; beberapa buku klasik dan laporan institusional tidak memiliki DOI.

Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487. doi: 10.1016/j.jpubeco.2010.11.006

Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring acute poverty in the developing world: Robustness and scope of the Multidimensional Poverty Index. *World Development*, 59, 251–274. doi: 10.1016/j.worlddev.2014.01.026

Alkire, S., Kanagaratnam, U., & Suppa, N. (2022). Revising the global Multidimensional Poverty Index: Empirical insights and robustness. *Review of Income and Wealth*, 68(S2), S347–S384. doi: 10.1111/roiw.12573

Alkire, S., Nogales, R., Quinn, N. N., & Suppa, N. (2021). Global multidimensional poverty and COVID-19: A decade of progress at risk? *Social Science & Medicine*, 291, 114457. doi: 10.1016/j.socscimed.2021.114457

Anand, S., & Sen, A. (1994). *Human development index: Methodology and measurement*. Human Development Report Office. DOI tidak tersedia.

Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press. DOI tidak tersedia.

Burchardt, T., & Vizard, P. (2011). “Operationalizing” the capability approach as a basis for equality and human rights monitoring in twenty-first-century Britain. *Journal of Human Development and Capabilities*, 12(1), 91–119. doi: 10.1080/19452829.2011.541790

Deaton, A. (2013). *The great escape: Health, wealth, and the origins of inequality*. Princeton University Press. DOI tidak tersedia.

Deneulin, S., & Shahani, L. (Eds.). (2009). *An introduction to the human development and capability approach: Freedom and agency*. Earthscan. DOI tidak tersedia.

Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A class of decomposable poverty measures. *Econometrica*, 52(3), 761–766. doi: 10.2307/1913475

Hick, R. (2012). The capability approach: Insights for a new poverty focus. *Journal of Social Policy*, 41(2), 291–308. doi: 10.1017/S0047279411000845

Martha C. Nussbaum. (1997). Capabilities and human rights. *Fordham Law Review*, 66(2), 273–300. DOI tidak tersedia.

Nussbaum, M. C. (2008). Creating capabilities: The human development approach and its implementation. *Hypatia*, 24(3), 211–215. doi: 10.1111/j.1527-2001.2009.01053.x

Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Belknap Press. doi: 10.4159/harvard.9780674061200

OPHI & UNDP. (2025). *Global Multidimensional Poverty Index 2025: Overlapping hardships: Poverty and climate hazards*. Oxford Poverty and Human Development Initiative and United Nations Development Programme. DOI tidak tersedia.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press. DOI tidak tersedia.

Robeyns, I. (2005). The capability approach: A theoretical survey. *Journal of Human Development*, 6(1), 93–117. doi: 10.1080/146498805200034266

Robeyns, I. (2017). *Wellbeing, freedom and social justice: The capability approach re-examined*. Open Book Publishers. doi: 10.11647/OBP.0130

Sen, A. (1981). *Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation*. Oxford University Press. DOI tidak tersedia.

Sen, A. (1985). *Commodities and capabilities*. North-Holland. DOI tidak tersedia.

Sen, A. (1989). Development as capability expansion. In K. Griffin & J. Knight (Eds.), *Human development and the international development*

strategy for the 1990s (pp. 41–58). Macmillan. doi: 10.1007/978-1-349-21136-4_3

Sen, A. (1992). *Inequality reexamined*. Harvard University Press. DOI tidak tersedia.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf. DOI tidak tersedia.

Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2010). *Mismeasuring our lives: Why GDP doesn't add up*. The New Press. DOI tidak tersedia.

United Nations Development Programme. (2025). *Human Development Report 2025: A matter of choice: People and possibilities in the age of AI*. UNDP. DOI tidak tersedia.

World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024: Pathways out of the polycrisis*. World Bank. DOI tidak tersedia.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 21 June 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/6a367378-8ec0-83ec-9269-457be2689547)). <https://chatgpt.com/c/6a367378-8ec0-83ec-9269-457be2689547>